

## Kajian Inovasi dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran

Suprianto<sup>1\*</sup>, Binar Dwiyanto Pamungkas<sup>1</sup>, Abdul Rahim<sup>2</sup>

1 Ekonomi Pembangunan/Universitas Samawa, Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

2 Ilmu Hukum/Universitas Samawa, Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: suprianto@universitas-samawa.ac.id

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi daerah yang diterapkan oleh OPD Kabupaten Sumbawa dan mengetahui persepsi OPD Kabupaten Sumbawa tentang inovasi daerah yang telah diterapkan, serta merumuskan strategi peningkatan inovasi Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkup Kabupaten Sumbawa. Sampel pada penelitian adalah 18 OPD yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sumbawa. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan jenis *Purposive Sampling*. Analisis data yang digunakan adalah Indeks Persepsi Inovasi. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 2 OPD yang tidak melakukan inovasi baik inovasi tata kelola perencanaan dan penganggaran maupun inovasi pelayanan publik lainnya. Sedangkan 16 OPD telah melakukan inovasi dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat, namun belum seluruhnya menerapkan inovasi yang berkaitan dengan tata kelola perencanaan dan penganggaran. Terdapat 12 OPD (67%) melaksanakan inovasi tata kelola perencanaan dan penganggaran, sedangkan 6 OPD (33%) lainnya belum melaksanakannya, hasil pemetaan menunjukkan terdapat 2 (dua) OPD yang inovasinya berada dalam kriteria biasa, 4 (empat) OPD dengan kriteria cukup inovatif, 8 (delapan) OPD dengan kriteria inovatif, dan 2 (dua) OPD dengan kriteria sangat inovatif. Sedangkan ditinjau dari dimensi produktif diketahui sebagian besar OPD dalam kriteria inovatif dengan rincian terdapat 6 (enam) OPD memiliki kriteria cukup inovatif, 8 (delapan) OPD dengan kriteria inovatif, dan 2 (dua) OPD dengan kriteria sangat inovatif. Persepsi OPD berdasarkan indeks inovasi tata kelola perencanaan dan penganggaran OPD di Kabupaten Sumbawa sebesar 75,067 dengan kriteria inovatif.

KataKunci : Kajian Inovasi, Indeks Persepsi Inovasi

### PENDAHULUAN

Adanya desentralisasi pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerah sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Otonomi daerah mampu memberikan dampak yang lebih baik terhadap pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak termasuk seluruh masyarakat sehingga tujuan otonomi daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator akan terwujud karena pemerintah yang lebih mengetahui sasaran, arah, dan tujuan yang ingin dicapai.

Permasalahan Anggaran Belanja Negara dan Daerah sejak era Orde Baru sampai era Pasca Reformasi, upaya optimalisasi anggaran belanja yang relatif belum mengalami perubahan signifikan ke arah pencapaian yang maksimal. Realitas ini ditandai dengan adanya temuan fakta yang mengungkapkan bahwa “kepentingan biaya operasional birokrat dialokasikan sekitar 70% dalam APBN dan APBD dan selebihnya 30 % untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan (Kompas 7 Januari 2013). Sucipto (2015) mengungkapkan bahwa permasalahan kompleks yang terdapat dalam anggaran belanja daerah adalah lemahnya perencanaan program penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban. Zimmermann (dalam Pratiwi, 2010) mempertegas dengan teori Principle-Agent, seperti halnya yang digunakan pemerintah daerah, yang terlibat langsung dalam proses penetapan kebijakan, yakni; *upper management* dan *manager departemen* adalah *agent* dan *voters* (rakyat). Namun, pada kenyataannya, terdapat sejumlah permasalahan dalam kaitan hubungan principal-agent, yaitu pertama, adanya perbedaan kepentingan principal dan agent. Principal dengan agent terjadi konflik atau perbedaan kepentingan yang memunculkan problem selanjutnya. Dalam upaya menjaga agar agent bersikap sesuai dengan keinginan/tuntutan principal, maka diciptakanlah sejumlah

mekanisme kontrol dan ini dapat menimbulkan biaya yang dinamakan “*agency cost*”. Kedua, masalah selanjutnya akan muncul jika mekanisme kontrol dalam evaluasi agent tidak berfungsi, akibatnya agent akan melakukan sesuatu tidak sesuai tuntutan/keinginan (disfungsional). Agent akan mencoba memanipulasi informasi dengan mengoptimalkan rancangan anggaran. Akibatnya lebih jauh adalah terjadinya konflik antara *manager department* dengan *voters* (rakyat). Teori tersebut di atas sesuai dengan kondisi faktual dalam proses penganggaran daerah tidak terlepas dari tiga kepentingan utama, yakni bupati, eksekutif, dan DPRD dalam penentuan Anggaran Belanja Daerah (Maggasingang, 2010).

Sementara itu permasalahan tata kelola perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sumbawa diantaranya masih besarnya porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Pada tahun 2013 sampai tahun 2017 alokasi belanja pegawai mencapai rata-rata 48,53% dari total belanja daerah. Besarnya alokasi belanja pegawai ini mengurangi kemampuan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membiayai pembangunan daerah. Permasalahan lainnya adalah pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran kas yang direncanakan, masih terdapat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sesuai jadwal (LPPD Kab. Sumbawa Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018).

Secara hirarki semangat dan dorongan berinovasi berawal dari kebijakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 386, 387 dan pasal 388 yang menjelaskan perlu adanya inisiatif untuk berinovasi oleh seluruh komponen pemerintah daerah (kepala daerah, OPD, DPRD) bahkan lapisan masyarakat. Inovasi juga menjadi program prioritas melalui Nawacita Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan reformasi birokrasi. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pasal 19 menyebutkan Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Penjelasan pasal tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang mengubah tatanan kebijakan pemerintah daerah melainkan kompatibel dengan nilai - nilai, norma - norma dan hukum. Artinya, sesuatu ide atau gagasan yang dalam pelaksanaannya melanggar kebijakan dan aturan hukum maka dapat dipastikan hal tersebut bukanlah inovasi. Jadi, tidak perlu takut untuk berinovasi karena inovasi itu sendiri memiliki payung hukum dan dorongan langsung dari pemerintah pusat. Selain kebijakan perundang-undangan, pemerintah daerah juga harus mengetahui bahwa inovasi tidak seberat yang dihadapi. Inovasi sebetulnya bersifat sederhana, yaitu tidak memerlukan anggaran besar dan kegiatan jangka panjang untuk memulainya.

Bentuk inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola Pemda, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan kriteria inovasi daerah meliputi mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah/masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi.

Penerapan Inovasi Daerah diperlukan serangkaian tahapan yang sistematis, terukur dan berkesinambungan dengan dukungan dari seluruh komponen baik dari pemerintah, sektor swasta dan seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai efektivitas dalam penerapannya. Inovasi Daerah khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah harus segera di implementasikan di Kabupaten Sumbawa karena terkait dengan pengelolaan anggaran, Anas (2017) menyatakan inovasi pengelolaan anggaran telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas.

Berdasarkan uraian diatas pemerintah kabupaten dianggap perlu menerapkan sistem inovasi daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggara Pemerintahan Daerah. Untuk itu diperlukan Kajian Inovasi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana berusaha untuk menggambarkan mengenai obyek penelitian secara lengkap, agar jelas keadaan atau kondisi obyek tersebut. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara tepat sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung pada penelitian.

Sampel pada penelitian adalah 18 OPD yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sumbawa. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan teknik nonprobability sampling dengan jenis *Purposive Sampling*.

Jenis data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data meliputi: persepsi pegawai Dinas Daerah & Badan Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tentang dimensi kebaruan, produktif, berdampak, berkelanjutan inovasi yang diterapkan.

## Analisis Data

### Indeks Persepsi Inovasi

Dalam pengukuran indeks persepsi inovasi ini dengan menggunakan skala likert 1-10 dengan tujuan agar responden memiliki keleluasaan dalam mempersepsikan kualitas dan manfaat inovasi. Pada skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari rentang yang tersedia. Suprihartini, dkk. (2017) berpendapat bahwa instrumen pengukuran indeks persepsi inovasi dibangun berdasarkan kerangka pikir yang mengelaborasi konsep - konsep inovasi, kebijakan, model pengukuran kinerja. Dari hasil elaborasi tersebut menghasilkan konstruksi instrumen yang mencakup aspek yang terdiri dari output dan outcome. Selanjutnya aspek dijabarkan kedalam empat dimensi yaitu kebaruan, produktif, berdampak, berkelanjutan. Keempat dimensi ini dijabarkan menjadi 23 indikator. Aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Dalam pengukuran indeks ini aspek mencakup dua hal yaitu output dan outcome. Output adalah hasil dari aktifitas atau kegiatan dari inovasi, yang dapat langsung dirasakan, dilihat dan dibuktikan oleh pengguna layanan. Outcome adalah Dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan inovasi yang diperoleh/diterima pengguna layanan. Penghitungan indeks persepsi inovasi dilakukan dengan cara menghitung nilai indeks persepsi inovasi sesuai dengan konstruksi instrument sebagaimana tersebut di atas dengan formula atau rumus sebagai berikut :

$$i = \frac{(50\% (S_{X1}) + 50\%(S_{X2})) \times 100}{10}$$

atau

$$i = 10 \left( \frac{1}{2} S_{X1} + \frac{1}{2} S_{X2} \right)$$

**Dimana :** I = Nilai indeks persepsi inovasi;  $S_{X1}$  = Nilai Aspek Output;  $S_{X2}$  = Nilai Aspek Outcome  
Aspek *output* Terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi kebaruan dan dimensi produktif, sehingga rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$S_{X1} = \frac{(60 (S_{X1.1}) + 40(S_{X1.2}))}{100}$$

**Dimana :**  $S_{X1.1}$  = Dimensi Kebaruan;  $S_{X1.2}$  = Dimensi Produktif

Setiap dimensi memiliki indikator tersendiri, Dalam hal ini Dimensi Kebaruan memiliki 8 indikator dan Dimensi Produktif memiliki 5 indikator. sehingga perhitungan tiap tiap dimensi adalah sebagai berikut:

$$S_{X1.n} = \frac{Sind_1 + \dots + Sind_y}{y}$$

**Dimana:**  $S_{X1.L.n}$  = Nilai tiap indikator pada aspek output;  $Sind_y$  = Indikator;  $y$  = Jumlah indikator

Aspek *Outcome* Terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi berdampak dan dimensi ada bukti inovasi, sehingga rumus perhitungan Aspek *Outcome* adalah sebagai berikut:

$$S_{X2} = \frac{(50 (S_{X2.1}) + 50(S_{X2.2}))}{100}$$

**Dimana:**  $S_{X2.1}$  = Dimensi berdampak;  $S_{X2.2}$  = Dimensi ada bukti inovasi

$$S_{X2.n} = \frac{Sind_1 + \dots + Sind_y}{y}$$

Setiap dimensi memiliki indikator tersendiri, Dalam hal ini Dimensi Berdampak memiliki empat indikator dan Dimensi Bukti memiliki enam indikator. sehingga perhitungan tiap tiap dimensi adalah sebagai berikut:

**Dimana:**  $S_{x2.n}$  = Nilai tiap indikator pada aspek outcome;  $Sind_y$  = Indikator;  $y$  = Jumlah indikator

Tabel 1 Skala Indeks Inovasi

No	KETERANGAN	RENTANG NILAI
1	Excellent innovation	91,01 - 100.00
2	Sangat inovatif	82,01 - 91.00
3	Inovatif	73,01 - 82.00
4	Cukup Inovatif	64,01 - 73.00
5	Biasa	55,01 - 64.00
6	Kurang Inovatif	46,01 - 55.00
7	Tidak inovatif	37,01 - 46.00
8	Sangat tidak inovatif	28,01 - 37.00
9	Inovasi Buruk	19,01 - 28.00
10	Inovasi Sangat Buruk	10,00 - 19.00

Sumber: Suprihartini, dkk. (2017)

## HASIL

### Identifikasi Inovasi OPD Di Kabupaten Sumbawa

Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 2 OPD yang tidak melakukan inovasi baik inovasi tata kelola perencanaan dan penganggaran maupun inovasi pelayanan publik lainnya. Sedangkan 16 OPD telah melakukan inovasi dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat, namun belum seluruhnya menerapkan inovasi yang berkaitan dengan tata kelola perencanaan dan penganggaran. Terdapat 12 OPD (67%) melaksanakan inovasi tata kelola perencanaan dan penganggaran, sedangkan 6 OPD (33%) lainnya belum melaksanakannya.

Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi inovasi yang dilakukan di masing-masing OPD berdasarkan dimensi yang ada adalah sebagai berikut: dilihat dari dimensi kebaruan, hasil pemetaan menunjukkan terdapat 2 (dua) OPD yang inovasinya berada dalam kriteria biasa. Dimensi kebaruan dengan kriteria biasa tersebut disebabkan belum maksimalnya perbaikan inovasi, keunikan inovasi yang rendah, belum adanya inovasi jenis baru, petugas inovasi yang tidak selalu ada pada saat dibutuhkan, minimnya informasi tentang inovasi yang dapat diperoleh secara mudah, jelas, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, belum sederhananya persyaratan yang diperlukan untuk menjalankan inovasi, dan proses pelaksanaan inovasi yang belum cukup mudah dan ringkas. Sedangkan ditinjau dari dimensi produktif diketahui sebagian besar OPD dalam kriteria inovatif dengan rincian terdapat 6 (enam) OPD memiliki kriteria cukup inovatif, 8 (delapan) OPD dengan kriteria inovatif, dan 2 (dua) OPD dengan kriteria sangat inovatif.

Sementara itu dilihat dari dimensi berdampak, hasil pemetaan menunjukkan terdapat 1 (satu) OPD yang inovasinya berada dalam kriteria biasa. Hal ini disebabkan belum tersedianyasarana dan prasarana inovasi secara inklusif atau memenuhi semua kebutuhan kelompok masyarakat (umur, jenis kelamin, pendidikan, berkebutuhan khusus, kondisi ekonomi, dan lain-lain), serta belum adanya inovasi yang terintegrasi dan/atau terpusat. Sedangkan ditinjau dari dimensi berkelanjutan diketahui sebagian besar OPD dalam kriteria cukup inovatif dengan rincian terdapat 1 (satu) OPD dengan kriteria biasa disebabkan belum maksimalnya peran swasta dalam peningkatan proses dan kualitas inovasi, dan belum maksimalnya penyedia inovasi memberikan penyelesaian aduan secara tepat.

Untuk OPD yang inovasinya masih termasuk dalam criteria biasa, harus mampu menaikkan criteria inovasinya. Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh OPD dalam meningkatkan inovasinya, misalnya salah satunya caranya dengan turun langsung ke masyarakat atau melalui inovasi yang menggunakan teknologi. Supendi (2015) mengatakan SKPD harus mampu hadir dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahkan harus jempot bola agar masyarakat bisa lebih mudah. Inovasi dan terobosan harus dilakukan apalagi saat ini eranya teknologi digital.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu OPD yang inovasinya masih dalam criteria biasa dapat mengadopsi inovasi yang telah dilaksanakan di daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama. Misalnya mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Indramayu. Salah satu contoh yang bisa menjadi rujukan atau referensi terkait pelayanan yang langsung turun ke masyarakat yaitu adanya perpustakaan apung. Keberadaan perpustakaan apung sangat membantu bagi anak-anak nelayan di daerah tersebut untuk mau datang ke perpustakaan dan membaca. Selain untuk anak-anak nelayan, perpustakaan apung juga banyak dimanfaatkan oleh pengunjung objek wisata untuk melakukan aktivitas membaca ditengah-tengah kunjungan wisatanya ([disarpus.indramayukab.go.id](http://disarpus.indramayukab.go.id)). Perpustakaan apung ini menerapkan konsep tematik agar pengunjung tidak merasa bosan. Konsep tematik ini dibuat perminggu dengan tema berbeda seperti mendongeng, melukis, dolanan, dengan mengundang narasumber yang berkompeten dibidangnya. Era otonomi daerah yang dituangkan dalam UU 32/2014 itu tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana tujuan itu sangat bergantung pada peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya referensi atau rujukan tersebut diatas diharapkan mampu menjawab apa yang menjadi penyebab belum optimalnya inovasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa.

Selanjutnya yang mendapat kriteria biasa adalah Dinas Satpol PP Kabupaten Sumbawa yang merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Terkait dengan hal tersebut Satpol PP memiliki pekerjaan yang sangat besar terkait dengan mengubah paradigma yang selama ini melekat di masyarakat, mengingat masih ada stereotype tentang pandangan umum bahwa Satpol PP sebagai tukang gusur. Untuk merubah hal tersebut dan meningkatkan criteria inovasinya Satpol PP dituntut untuk lebih kreatif dalam berinovasi terutama dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Sinoeng (2017) Satpol PP hadir Utamanya yang berkenaan dengan mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum), baik di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal. Karwo (2015) mengatakan Dalam undang-undang 33 tahun 2014 bertujuan untuk peningkatan pelayanan public, dimana orientasinya pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas Satpol PP Provinsi Jawa Tengah salah satu contoh yang bisa menjadi rujukan atau referensi terkait inovasi pelayanan adalah Satpol PP *Goes To School*. Program ini merupakan sebuah terobosan dan inovasi yang digagas oleh satpol PP provinsi Jawa Tengah dalam menjawab tantangan dan perkembangan sosial di masyarakat akan kerawanan, ketentraman dan ketertiban umum dikalangan pelajar SMA/SMK. Satpol PP turun ke sekolah-sekolah mengadakan kegiatan yang menarik, menggembirakan, dan edukatif, memberikan pengarahan tentang bahaya radikalisme, terorisme, intoleransi, narkoba, tawuran dan tindakan tidak terpuji lain. Hal ini adalah upaya persuasif dan preventif dalam menangkal berbagai paham yang membahayakan keutuhan bangsa. Dalam merealisasikan satpol PP goes to school diharapkan dengan penampilan yang mempesona dan tidak terkesan angker atau galak. Sehingga para siswa merasa bahagia dengan kehadiran satpol PP di sekolah tersebut. Dengan mengambil contoh Satpol PP Jawa Tengah sebagai referensi terkait inovasi diharapkan mampu menambah wawasan bagi Dinas Satpol PP Kabupaten Sumbawa dalam berinovasi sehingga mampu menikkan criteria inovasinya.

Selanjutnya OPD yang memiliki criteria cukup inovatif, inovatif, dan sangat inovatif masih bisa untuk menaikkan criterianya menjadi excellent inovatif yaitu dengan cara meningkatkan lagi dimensi-dimensi yang terdiri dari beberapa indicator melalui beberapa kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya untuk merangsang ide masing-masing OPD dalam berinovasi dengan melakukan studi banding ke daerah atau instansi yang sudah menerapkan dan mengimplementasikan inovasi tata kelola perencanaan dan penganggaran. Ada beberapa daerah yang bisa dijadikan rujukan atau referensi oleh OPD di kabupaten Sumbawa antara lain : Kota Bandung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Gorontalo yang secara nasional sudah mendapat penghargaan tingkat Nasional terkait inovasi.

Hal lain yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan inovasi adalah pemberian reward bagi OPD yang sudah berinovasi dan *punishment* dan bagi OPD yang belum berinovasi. Dengan demikian maka kebijakan-kebijakan yang menunjang penguatan implementasi inovasi daerah perlu dilakukan secara terus menerus artinya istilah *continuous improvement* harus menjadi landasan yang kuat bagi semua *stakeholder* dalam setiap lini organisasi. Oktaviana (2014) berpendapat salah satu contoh yang kongkrit dalam penguatan inovasi daerah adalah memberi *reward* atau penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual. Sejalan dengan apa yang dikemukakan David (2017) setiap OPD yang sudah mengimplementasikan Inovasi yang sukses akan diberi apresiasi dan yang bermasalah mendapat sanksi. Selanjutnya Setiap OPD harus memiliki target dalam mengimplementasikan inovasi terkait tata kelola perencanaan dan penganggaran dengan cara mencanangkan OPD sebagai laboratorium pemerintahan. Setiap OPD dituntut untuk berinovasi dengan cara memberikan kewenangan mutlak kepada masing-masing OPD tersebut untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam melayani masyarakat

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil identifikasi diketahui penyebab masih adanya OPD yang belum melakukan inovasi karena belum semua OPD mengetahui dan memahami pentingnya inovasi sebagaimana tertuang dalam kebijakan nasional dalam rangka penguatan SIDA khususnya peraturan bersama Menristek dan Mendagri nomor 03 Tahun 2012 dan nomor 36 tahun 2012 tentang penguatan SIDA. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah BPP Kemendagri (2012) yang menyatakan belum semua SKPD mengetahui dan memahami kebijakan nasional dalam rangka penguatan SIDA khususnya peraturan bersama Menristek dan Mendagri nomor 03 Tahun 2012 dan nomor 36 tahun 2012 tentang penguatan SIDA.

Berdasarkan hasil indeks inovasi tata kelola perencanaan dan penganggaran OPD di Kabupaten Sumbawa sebesar 75,067 dengan kriteria inovatif. Namun masih terdapat indikator-indikator yang tergolong cukup inovatif yaitu ketersediaan sarana dan prasarana inovasi secara inklusif dan peran swasta dalam peningkatan proses dan kualitas inovasi. Belum optimalnya indikator-indikator ini disebabkan beberapa hal antara lain belum ada formulasi khusus tentang penerapan inovasi perencanaan dan penganggaran, belum ada regulasi tingkat daerah yang mengatur tentang adanya pelibatan sektor swasta maupun masyarakat dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran, dan keterbatasan anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana inovasi.

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan Narutomo (2014) bahwa nilai tambah dapat diperoleh dalam Penguatan inovasi daerah yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan juga pihak swasta, akademisi serta birokrasi pemerintah itu sendiri, untuk saling bahu membahu mewujudkan Inovasi Daerah. Nilai tambah tersebut, pada akhirnya akan menjadi peningkatan daya saing daerah dan kemudian secara nasional menjadi daya saing nasional. Perkembangan pembangunan daerah menunjukkan bahwa faktor-faktor lokalitas seperti ketersebaran geografis, dan keanekaragaman sosial dan budaya pembelajaran lokal semakin penting sebagai faktor yang menentukan keunggulan daya saing daerah. Oleh karena itu, dalam kerangka penguatan sistem inovasi, dimensi lokalitas sangatlah penting dalam memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2012).

Secara nasional tantangan inovasi di Indonesia saat ini meliputi rendahnya input Inovasi, keluaran lembaga litbang belum yang memuaskan dan belum dominannya peran pihak swasta dalam inovasi nasional (Marzan, 2011). Untuk itu diperlukan regulasi yang sesuai dalam rangka penerapan inovasi khususnya terkait perencanaan dan penganggaran, mengakselerasi draft regulasi yang diperlukan, dan menyesuaikan regulasi yang ada dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah. Peningkatan dukungan infrastruktur serta inovasi infrastruktur bisnis yang diperlukan dengan mengutamakan perkembangan IPTEK. Penyediaan insentif untuk kegiatan inovasi yang memajukan daya saing daerah, inovasi yang diterapkan haruslah memiliki keunikan dan memunculkan ciri khas dari daerah, fikri (2017) mengatakan Branding merupakan bentuk salah satu dari inovasi pemerintahan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Tentu, brand ini menjadi pilihan untuk mengingatkan masyarakat kepada suatu daerah dan menjadi ciri khas tersendiri dengan daerah lain.

Pada dasarnya keberhasilan inovasi daerah sangat tergantung pada OPD sebagai pelaksana inovasi itu sendiri. Oktaviana (2014) berpendapat faktor penting keberhasilan maupun keberlanjutan implementasi

inovasi daerah tergantung dari sejauh mana SKPD di atas mampu mengintegrasikan program dan kegiatan implementasi inovasi daerah dalam rencana kerja masing masing. Untuk dapat menilai kinerja organisasi yang memuaskan atau tidak, diperlukan perubahan organisasi yang bersifat strategis. Cara kerja organisasi yang masih menganut asas “seperti sedia kala” tidak akan bisa meningkatkan produktivitas dan efektivitasnya di masa yang akan datang, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sartika (2015) Organisasi yang ingin meningkatkan produktivitas dan efektivitasnya, pada akhirnya menghadapi berbagai masalah yang timbul di masa depan, memerlukan cara berpikir dan bertindak yang inovatif. Inovasi dapat menyangkut penciptaan produk baru (baik dalam arti barang atau jasa), struktur baru, hubungan baru dan bahkan juga kultur baru (Siagian, 2007; 258).

Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Sumbawa selaku *supporting staff* harus terus membuka komunikasi yang efektif dengan para *stakeholder* agar dicapai pemahaman bersama yang selanjutnya dapat menumbuhkan komitmen diantara seluruh pihak. Dengan adanya komitmen ini diharapkan mampu mereduksi ego sektoral yang kerap dijumpai sebagai permasalahan dalam hal koordinasi. Bentuk konkrit dari upaya ini adalah adanya pertemuan rutin terjadwal yang membahas isu aktual atau pun perumusan strategi bersama serta evaluasi hasil capaian yang sudah atau pun belum tercapai. Oktaviana (2014) berpendapat mewujudkan kerja sama intensif dengan unit kerja di bawah untuk mendorong penguatan kelembagaan. Sehingga fungsi kelitbangan atau pun percepatan difusi inovasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terealisasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 2 OPD yang tidak melakukan inovasi baik inovasi tata kelola perencanaan dan penganggaran maupun inovasi pelayanan publik lainnya. Sedangkan 16 OPD telah melakukan inovasi dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat, namun belum seluruhnya menerapkan inovasi yang berkaitan dengan tata kelola perencanaan dan penganggaran. Terdapat 12 OPD (67%) melaksanakan inovasi tata kelola perencanaan dan penganggaran, sedangkan 6 OPD (33%) lainnya belum melaksanakannya.
2. Berdasarkan aspek output dimensi kebaruan, hasil pemetaan menunjukkan terdapat 2 (dua) OPD yang inovasinya berada dalam kriteria biasa, 4 (empat) OPD dengan kriteria cukup inovatif, 8 (delapan) OPD dengan kriteria inovatif, dan 2 (dua) OPD dengan kriteria sangat inovatif. Sedangkan ditinjau dari dimensi produktif diketahui sebagian besar OPD dalam kriteria inovatif dengan rincian terdapat 6 (enam) OPD memiliki kriteria cukup inovatif, 8 (delapan) OPD dengan kriteria inovatif, dan 2 (dua) OPD dengan kriteria sangat inovatif. Berikut sebaran nilai dimensi OPD ditinjau dari aspek output (dimensi kebaruan dan produktif).
3. Berdasarkan aspek outcome dimensi berdampak, hasil pemetaan menunjukkan terdapat 1 (satu) OPD yang inovasinya berada dalam kriteria biasa, 7 (tujuh) OPD dengan kriteria cukup inovatif, 5 (lima) OPD dengan kriteria inovatif, dan 3 (tiga) OPD dengan kriteria sangat inovatif. Sedangkan ditinjau dari dimensi berkelanjutan diketahui sebagian besar OPD dalam kriteria cukup inovatif dengan rincian terdapat 1 (satu) OPD dengan kriteria biasa disebabkan belum maksimalnya peran swasta dalam peningkatan proses dan kualitas inovasi, dan belum maksimalnya penyedia inovasi memberikan penyelesaian aduan secara tepat, 8 (delapan) OPD memiliki kriteria cukup inovatif, 4 (empat) OPD dengan kriteria inovatif, dan 2 (dua) OPD dengan kriteria sangat inovatif.
4. Persepsi OPD berdasarkan indeks inovasi tata kelola perencanaan dan penganggaran OPD di Kabupaten Sumbawa sebesar 75,067 dengan kriteria inovatif. Namun masih terdapat indikator-indikator yang tergolong cukup inovatif yaitu ketersediaan sarana dan prasarana inovasi secara inklusif dan peran swasta dalam peningkatan proses dan kualitas inovasi. Belum optimalnya indikator-indikator ini disebabkan beberapa hal antara lain belum ada formulasi khusus tentang penerapan inovasi perencanaan dan penganggaran, belum ada regulasi tingkat daerah yang mengatur tentang adanya pelibatan sektor swasta maupun masyarakat dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran, dan keterbatasan anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana inovasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika, Jakarta.
- Fikri, Haidar. 2017. *Inovasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Melalui City Branding "The Sunrise Of Java" Sebagai Strategi Pemasaran Pariwisata*. Jurnal Aristo/06/Vol. 05/No. 02 Juni 2017.
- Freeman, S. J. (1987). Corporate social performance and attractiveness as an employer to different job seeking populations. *Journal of Business Ethics*, 28(3), 243–253.
- Hall, Stuart. 2003. *"The Work of Representation" Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. London: Sage Publication.
- Harian Kompas, terbitan 7 januari 2013, tentang isi berita terkait biaya operasional birokrasi dan penggunaan APBD yang tidak Pro Rakyat.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2012. Peraturan Bersama Mendagri Nomor 36 Tahun 2012 dan Menristek Nomor 3 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- Jogiyanto, Hartono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis. Edisi Ke-6*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Tahun Anggaran 2018. <https://www.sumbawakab.go.id>
- Laporan Pendahuluan Penyusunan Roadmap SIDA Provinsi Kalimantan Utara. [bappeda.kaltaraprov.go.id](http://bappeda.kaltaraprov.go.id)
- Lundvall, B.A., 1992, *National Systems Of Innovation: Towards A Theory Of Innovation And Interactive Learning*. Pinter, London.
- Maggasingang Djainuddin. 2010. *Kinerja DPRD Bidang Anggaran*. Jurnal Amanah, Vol.1,7,1-12
- Moleong, J.L. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Rosdakarya, Bandung.
- Narutomo, Teguh. 2014. *Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sebagai Exit Strategy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014: Halaman 143 – 156.
- Nasution. 2011. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- OECD/Eurostat. 2005. *Oslo Manual: Guidelines For Collecting and Interpreting Innovation Data (Third Edition)*. Paris: OECD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Pratisto, Arif. 2009. *Statistik Menjadi Mudah dengan SPSS 17*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pratiwi, NurRatih. 2010. *Politisasi Anggaran Sektor Publik*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.1 tahun (2010:186-187)
- Robinson, Pearce. 1997. *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian. Jilid 1*. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Suprihartini, Ani, dkk. 2017. *Panduan Pengukuran Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik 2017*. Pusat Inovasi Pelayanan Publik – LAN.
- Suurs, Roald A.A. 2009. *Motors of Sustainable Innovation : Towards a Theory on the Dynamics of Technological Innovation Systems*. Utrecht University. Utrecht. <http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-0318-201903/suurs.pdf>.



- Sutikno, Wariki, dkk. 2011. *Laporan Akhir Kajian Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*.: Direktorat Otonomi Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta.
- Yenny Sucipto. 2015. Korupsi terjadi sejak Perencanaan Anggaran, : <http://acch.kpk.go.id/>
- Yusnita, Maya dan Nanang Wahyudin. 2017. *Entrepreneurial Leadership melalui Kapasitas Inovasi sebagai Upaya Peningkatan Keunggulan Kompetitif UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (Kajian Usaha Mikro di Kabupaten Bangka)*. Integrated Journal of Business and Economics (IJBE) Vol.1 No.1 2017.